

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemuda adalah generasi emas yang digadang-gadang dan diharapkan menjadi penerus tonggak perjuangan memajukan harkat dan martabat bangsa. Keberadaan pemuda sejatinya menjadi harapan baru lahirnya generasi pembaharu yang akan terus memberikan inovasi-inovasi dalam berbagai bidang kehidupan. Eksistensi pemuda harus selalu diberikan perhatian karena kemana arah suatu bangsa ke depan tergantung pada seberapa hebatnya kita menyiapkan para pemuda-pemuda bangsa. Pemuda yang juga merupakan bagian dari warga negara, baik dalam kapasitasnya sebagai individu/perorangan maupun dalam kelompok atau komunitas/organisasi, seringkali identik dengan suatu proses yang dinamis dan segala bentuk perubahan (Widiatmaka, 2016., Putri, dkk 2014).

Ditinjau dari segi historis dapat kita telaah kembali bagaimana sumbangsih dan peran pemuda dalam memeperjuangkan kemerdekaan Indonesia, menyuarakan ketidakadilan, menjadi pelaku sejarah dalam pergantian rezim kepemimpinan dan umumnya bagaimana peran pemuda mengawal dan mengawasi keberlangsungan negara. Pemuda merupakan aset terbesar bangsa sekaligus menjadi tumpuan harapan yang akan menegakkan kembali cita-cita bangsa, selain itu pemuda juga merupakan bagian dari roda perputaran zaman yang diharapkan dapat menjadi *agent of change* (Dewanta dan Syaifullah, 2008, Abdullah dan Yasin, 1974., Gordon dan Gordon, 2003).

Menurut Naafs & White (2012), sebagai bagian dari agenda pemerintah untuk mendepolitisasi pemuda, ide-ide dan kategori baru pemuda di perkenalkan, seperti pengertian “remaja”. Berbeda dengan pengertian *pemuda* yang problematis, remaja mempunyai konotasi “selera”, “mode”, “musik” dan “bahasa anak muda” tersendiri. Dalam pengertian sederhana pemuda diidentikkan dengan persepsi yaitu apakah hanya

merupakan golongan usia tertentu, ataukah sebagai kelas sosial dalam masyarakat dimana mempunyai dua potensi, bisa merusak dan bisa juga membangun. Sebagai pihak yang bergantung pada pasar atau kekuasaan, ataukah sebagai subjek otonom atau mandiri yang mempunyai kekuatan sendiri untuk merubah tatanan sosial. Sejak tahun 1970-an pemuda menjadi sasaran empuk di media massa sebagai konsumen potensial (Siegel dalam Fitrah, 2016.,Widyanto 2010).

Menurut Wibawa (2013) masa transisi yang dialami pemuda menyebabkan pergolakan yang dasyat dalam diri pribadinya. Masa-masa inilah proses menjadi matang itu bisa dioptimalisasi dengan pemberdayaan potensi yang dimiliki. Selain itu pemuda selayaknya dipandu untuk terbiasa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Problem yang muncul menjadi alat untuk mematangkan jati diri dan kekuatan pemuda sehingga potensinya tidak tergerus oleh persoalan yang dihadapi Kaum muda sering dianggap sebagai pembuat ulah dan biang keonaran, mereka kerap diidentikan dengan ketidakmampuan untuk menghargai dan toleran kepada pihak lain. Diskriminasi atas label inilah yang mendorong mereka untuk sekedar unjuk gigi kepada khalayak, bahwa mereka dapat bergerak dalam isu-isu yang positif (Nugroho, 2015).

Di era milenial abad 21 ini, kita sama-sama menyaksikan betapa perubahan begitu cepat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan. Pengaruh teknologi dan informasi digital menuntut kita semua tak terkecuali para pemuda untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan agar tidak tertinggal dengan negara-negara lain. Disamping itu, kita juga harus tetap mawas diri dan tidak melupakan jati diri sebagai sebuah bangsa. Oleh karena itu dalam memperkuat jati diri sebagai sebuah bangsa, kita harus melekwacana tentang kewarganegaraan (*civic literacy*) atau memiliki dasar pengetahuan tentang konsep nilai berbangsa dan bernegara. Sederhananya adalah memahami nilai-nilai budaya atau identitas lokal yang menjadi tolak ukur sikap dan perilaku sehari-hari kita sebagai warga negara Indonesia (Agustin 2011., Nurriszka, 2016).

Globalisasi kemudian tampak mewakili perubahan besar dalam aktivitas manusia skala yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia (Giddens, 2000). Satu-satunya hal yang nampaknya penelitian dan literatur ilmiah setuju tentang adalah bahwa itu adalah fenomena yang terjadi dan tingkat di mana itu akan terjadi terus terjadi akan menjadi eksponensial. Namun ada perbedaan pendapat tentang kapan itu dimulai, apa yang mendorongnya, siapa yang berdiri untuk mendapatkan dan siapa yang akan rugi. Seperti tadi contoh menunjukkan, hal-hal ini sangat tergantung pada posisi yang diambil dalam ceramah. Mengingat bahwa ada posisi yang berbeda dalam wacana globalisasi kemudian, definisi fenomena cenderung bermasalah (Singer 2002., Urry, 2003., Mulya, & Ratna, 2013).

Soemantri dalam Syahri (2013) mengemukakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai peran penting dalam penanaman nilai, karena koridornya *value based*, nilai tersebut harus diajarkan dalam pendidikan formal maupun non formal seperti PKn kemasyarakatan (*community civics*). Sedangkan objek studi *Civics* dan Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*) adalah warga negara dalam hubungannya dengan organisasi kemasyarakatan, sosial, ekonomi, agama dan negara.

Litersi kewarganegaraan (*civic literacy*) menjadi penting seiring dengan perubahan dan perkembangan teknologi. Terdapat beberapa komponen yang menjadi bagian terpenting dalam *civic literacy* yaitu komponen pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*) dan karakter atau sikap kewarganegaraan (*civic disposition*) yang merupakan faktor dasar dalam upaya membentuk warga negara yang baik (*good citizenship*). Dalam konteks integrasi, *civic literacy* menjadi sangat vital dalam menumbuhkembangkan sikap dan perilaku warga negara yang kontributif dalam upaya membangun integrasi nasional. Pada akhirnya pengembangan perilaku integrasi yang berhasil dalam diri warga negara dapat mewujudkan kehidupan berbangsa dan

bernegara yang produktif dalam rangka terwujudnya tujuan dan cita-cita bersama sebagai bangsa Indonesia (Cholisin, 2010).

Pengaruh arus deras budaya global yang negatif juga menyebabkan kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa dirasakan semakin memudar. Hal ini tercermin dari perilaku masyarakat Indonesia yang lebih menghargai budaya asing dibandingkan budaya bangsa, baik dalam cara berpakaian, bertutur kata, pergaulan bebas, dan pola hidup konsumtif, serta kurangnya penghargaan terhadap produk dalam negeri di kalangan masyarakat dewasa ini (Andriani, 2015: <http://www.membumikanpendidikan.com/2015/03/permasalahan-bangsa-dewasaini-dalam.html>., Musa, 2015., Indratmoko 2017).

Terkait dengan permasalahan literasi secara umum, data dari penelitian yang dilakukan oleh *Programme for International Student Assessment* (PISA) pada tahun 2012 menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat 60 dengan skor 396 dari total 65 peserta negara untuk kategori literasi (membaca). Data terbaru terkait dengan tingkat literasi Indonesia pada tahun 2016, disampaikan oleh *Central Connecticut State University*, Amerika Serikat dengan data bertajuk *World's Most Literate Nations Ranked* yang dirilis pada 9 Maret 2016. Penelitian tersebut menempatkan Indonesia di peringkat ke 60 dari total 61 negara yang diteliti (Firman, 2016: <https://tirto.id/literasi-indonesia-yangbelum-merdeka-bBJS>).

Rendahnya peringkat literasi Indonesia berdampak pada rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. *The Learning Curve Pearson*, sebuah lembaga pemeringkatan pendidikan dunia pada bulan Mei 2014 merilis data mengenai peringkat mutu pendidikan dunia. Indonesia duduk di posisi terakhir dari 40 negara yang terdata dengan penilaian secara keseluruhan minus 1,84. Fenomena rendahnya tingkat literasi dan mutu pendidikan di Indonesia bertolak belakang dengan perkembangan teknologi informasi terkait dengan media sosial di Indonesia. Pada jejaring sosial dunia seperti *instagram*, *facebook*, *path* dan lain sebagainya, pengguna asal Indonesia

menduduki peringkat 10 Besar pengguna terbesar situs-situs tersebut. Umumnya dalam perkembangannya sosial media banyak disalahfungsikan salah satunya yaitu menjadi media penyebaran berita bohong (*hoax*). Yang sangat berperan disini adalah literasi media sosiasal yang merupakan bagian dari *civic literacy*. (Chandra, 2014: <http://www.kompasiana.-com-/10-peringkat-indonesia-di-dunia.>, Rahadi, 2017., Aribowo, 2017., Martens, & Hobbs, 2015).

Literasi saat ini sudah berkembang maknanya, tidak hanya sekedar kemampuan membaca dan menulis, tetapi sudah berkembang menjadi kemampuan menambah pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dapat membuat seseorang memiliki kemampuan berpikir kritis, mampu memecahkan masalah dalam berbagai konteks, mampu berkomunikasi secara efektif dan mampu mengembangkan potensi dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat (Lukitoaji, 2017).

Problematika yang terjadi pada pemuda ini tidak lain adalah salah satu kajian dari ilmu kewarganegaraan, kajian pada suatu subjek warga negara, yaitu pemuda. Nussbaum (Banks, 2008) mengutarakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan harus membantu siswa mengembangkan identitas dan keterikatan pada komunitas global dan hubungan manusia kepada orang lain di seluruh dunia. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membangun generasi muda menjadi warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizen*). Meluasnya studi-studi menyangkut kewarganegaraan tak diragukan lagi tidak hanya berkaitan dengan konteks berkembangnya demokrasi, tetapi juga upaya penguatan karakter warga negara membangun karakter (*character building*) generasi muda merupakan upaya untuk membangun bangsa utamanya generasi muda (Juru, 2013., Ambarita, 2013., Fatahillah. 2017).

Perlunya penguatan *civic literacy* merupakan salah satu bentuk upaya menaggulangi ancaman masalah maupun mengatasi persoalan-persoalan bangsa, terutama bagi generasi muda yang sedang dalam proses perkembangan. Penguatan *civic literasi* mengarah kepada bagaimana

membentuk warga negara yang aktif dan partisipatif dalam merespon permasalahan yang ada di lingkungan sekitarnya. Selain itu penguatan *civic literacy* juga harus mampu memberikan arah berfikir para pemuda agar tidak hanya bertindak berdasarkan orientasi diri pribadi tetapi juga kepentingan bersama dan mendorong warga negara untuk turut serta membangun bangsa dengan aksi dan keahlian serta pemikiran masing-masing (Raharjo *et al.*, 2017, Carnegie Corporation. 2011.).

Kemelekwacanaan warga menjadi elemen penting dalam menentukan kualitas partisipasi warga negara. Hal ini disebabkan proses partisipasi yang disertai dengan daya nalar yang kuat dan melalui pemikiran yang kritis akan mempengaruhi kemajuran partisipasi politik tersebut. Untuk menghasilkan partisipasi yang positif bukan hanya diperlukan pengetahuan saja, tetapi dibutuhkan keterampilan yang memadai guna adanya perubahan terhadap situasi yang ada. Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan bukan hanya sekedar menumbuhkan partisipasi dari warga negara namun benar-benar sebagai partisipasi yang cerdas dan penuh tanggung jawab, serta terampil dalam melakukan tindakan yang terarah dan efektif. Keterlibatan warga negara dapat dilakukan melalui tindakan kolektif dan individu dalam mempengaruhi satu sama lain (Rahman, 2016., Adler & Goggin, 2005).

Di tengah upaya gencar mengembangkan literasi kewarganegaraan (*civic literacy*), peneliti tertarik mengkaji *civic literacy* dari anggota sebuah organisasi kepemudaan di Kabupaten Sumbawa Barat, khususnya di lingkungan Organisasi **Ikatan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa (IKPPM) Desa Lalar Liang**, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Karena pada hakikatnya organisasi merupakan bagian dari lingkungan kewarganegaraan, Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Berkowitz, Ford, & Brewer, (2005) bahwa Lingkungan kewarganegaraan melibatkan pemberdayaan orang untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk mengidentifikasi nilai dan

tujuan mereka sehubungan dengan lingkungan dan bertindak sesuai, berdasarkan pengetahuan terbaik tentang pilihan dan konsekuensi.

Organisasi IKPPM Desa Lalar Liang merupakan bagian dari lingkungan itu. Organisasi IKPPM Desa Lalar Liang adalah salah satu dari beberapa organisasi IKPPM yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat yang merupakan organisasi Pelajar dan Mahasiswa bejenjang yang memiliki tingkatan, mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan hingga Kabupaten. Organisasi ini biasanya mengadakan kegiatan baik di lingkungan sekitar maupun di berbagai daerah tempat mereka menuntut ilmu.

Persepsi Organisasi IKPPM Desa Lalar Liang tentang literasi kewarganegaraan (*civic literacy*) masih belum diketahui, hal ini dikarenakan bahwa istilah *civic literacy* adalah istilah baru bagi mereka dan secara konsep mereka belum mengetahui seutuhnya. Namun demikian dalam tataran praktis organisasi, berdasarkan hasil pengamatan dan informasi awal yang diperoleh dari Ketua Organisasi IKPPM Desa Lalar Liang saudara Ajit Pabriansyah, S.T., bahwa Organisasi IKPPM desa Lalar Liang merupakan salah satu dari beberapa organisasi IKPPM Tingkat desa yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial baik di lingkungan desa maupun di Lingkungan studi masing-masing diantaranya adalah Kegiatan Pekan Budaya Desa lalar liang yang diadakan pada 5-7 Juli 2017 di Desa Lalar Liang, kegiatan Halal Bi Halal Setiap tahun setelah ramadhan, kegiatan penggalangan dana untuk korban gempa Lombok pada tanggal 7 Agustus 2018 di Lingkungan desa Lalar Liang, kegiatan penggalangan dana untuk korban gempa Palu dan Donggala pada tanggal 30 September 2018 di Kota Mataram dan lain sebagainya.

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini akan mengkaji bagaimana persepsi organisasi IKPPM Desa Lalar Liang terhadap literasi kewarganegaraan (*civic literacy*) dalam upaya membangun partisipasi anggota organisasi sebagai bagian dari warga negara yang aktif.

1.2 Rumusan Masalah

Persepsi Organisasi IKPPM Desa Lalar Liang tentang literasi kewarganegaraan (*civic literacy*) masih belum diketahui, hal ini dikarenakan bahwa istilah *civic literacy* adalah istilah baru bagi mereka dan secara konsep mereka belum mengetahuinya seutuhnya. Namun demikian, dalam tataran praktis organisasi, berdasarkan hasil pengamatan awal bahwa Organisasi IKPPM desa Lalar Liang merupakan salah satu dari beberapa organisasi IKPPM Tingkat desa di Kabupaten Sumbawa Barat yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial baik di lingkungan desa maupun di Lingkungan studi masing-masing.

Berdasarkan masalah umum di atas dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi anggota organisasi IKPPM Desa Lalar Liang terhadap *civic literacy*?
2. Bagaimana *civic literacy* dijadikan pijakan dalam membangun semangat partisipasi aktif anggota organisasi IKPPM Desa Lalar Liang?
3. Bagaimana aktualisasi nilai-nilai *civic literacy* dalam memperkuat partisipasi anggota organisasi IKPPM Desa Lalar Liang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan tentang persepsi dan cara pandang para pemuda anggota organisasi kepemudaan di Sumbawa terhadap literasi kewarganegaraan (*civic literacy*) dalam meningkatkan partisipasi warga negara.

2. Tujuan Khusus

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengkaji bagaimana persepsi anggota organisasi IKPPM Desa Lalar Liang terhadap *civic literacy*;

2. Menganalisis bagaimana *civic literacy* dijadikan pijakan dalam membangun semangat partisipasi aktif anggota organisasi IKPPM Desa Lalar Liang;
3. Menganalisis bagaimana aktualisasi nilai-nilai *civic literacy* dalam memperkuat partisipasi anggota organisasi IKPPM Desa Lalar Liang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif, yaitu sebagai berikut :

1. Segi Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan konsep-konsep literasi kewarganegaraan (*civic literacy*), khususnya tentang *civic literacy* kepada anggota organisasi pemuda.

2. Segi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan yang lebih bijak dalam menghadapi permasalahan sosial terutama mengenai upaya menumbuhkembangkan nilai-nilai literasi kewarganegaraan dalam berbagai lingkungan dan pergaulan hidup baik secara lokal maupun global sehingga upaya menciptakan warga negara yang partisipatif dapat diwujudkan dengan baik.

3. Segi Praktis

- a. Dapat dikajinya persepsi anggota organisasi IKPPM Desa Lalar Liang terhadap *civic literacy*;
- b. Dapat dianalisisnya bagaimana *civic literacy* dijadikan pijakan dalam membangun semangat partisipasi aktif anggota organisasi IKPPM Desa Lalar Liang;
- c. Dapat dianalisisnya aktualisasi nilai-nilai *civic literacy* dalam memperkuat partisipasi anggota organisasi IKPPM Desa Lalar Liang.

4. Segi Isu dan Aksi Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, yaitu:

- a. Masyarakat umum, sebagai bahan refleksi dan motivasi untuk berperan aktif dalam upaya penguatan nilai-nilai literasi kewarganegaraan (*civic literacy*) di tengah-tengah masyarakat;
- b. Akademisi, praktis pendidikan, pegiat literasi, dan tokoh masyarakat, sebagai bahan kontribusi konsep dan paradigma pengembangan nilai-nilai literasi kewarganegaraan (*civic literacy*) dengan melibatkan peran aktif warga negara.

1.5 Struktur Organisasi Tesis

Struktur penulisan tesis yang akan ditulis terdiri dari 5 bab, yakni:

Bab I menyajikan tentang fakta-fakta dan data-data yang terkait dengan isu atau fenomena yang melatarbelakangi. Pada bab I ini akan diuraikan pendahuluan yang mendeskripsikan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, fokus masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, dan struktur organisasi penulisan tesis.

Bab II membahas tinjauan pustaka yang meliputi konsep-konsep, teori-teori yang berkaitan dengan literasi kewarganegaraan (*civic literasi*). Selain itu, penelitian terdahulu dan kerangka konsep penelitian juga termasuk dalam bab ini.

Bab III dalam penelitian ini membahas tentang metode penelitian. Adapun sub bab yang dibahas dalam bab ini mencakup desain penelitian,

subjek dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, keabsahan data dan agenda/jadwal penelitian.

Bab IV membahas tentang temuan dan pembahasan, yang mencakup gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V membahas tentang kesimpulan dan saran. Mencakup kesimpulan umum, kesimpulan khusus, implikasi dan rekomendasi.